

## **Pendampingan Penyelenggaraan Kawasan Permukiman**

Aning Yustica Sari Abdullah  
Universitas Bina Taruna Gorontalo  
e-mail: [yustica.aning@gmail.com](mailto:yustica.aning@gmail.com)

**Received: 23 January 2022; Revised: 12 February 2022; Accepted: 28 February 2022**

**DOI: <http://dx.doi.org/10.37905/dikmas.2.1.183-190.2022>**

### **Abstrak**

Penyelenggaraan kawasan permukiman di daerah membutuhkan pendampingan teknis dari Pemerintah Pusat sehingga dapat terwujud sesuai dengan amanat undang-undang. Pendampingan penyelenggaraan kawasan permukiman diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam menyelenggarakan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Pendampingan penyelenggaraan kawasan permukiman di provinsi Gorontalo telah meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dalam lingkup aspek pengelolaan data dan informasi, aspek perencanaan, aspek standar teknis dan aspek kelembagaan. Pemerintah daerah sudah melaksanakan seluruh aspek penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayahnya sehingga dapat menjamin hasil pembangunan bidang PKP akan lebih berkualitas dan tepat guna berdasarkan peraturan dan pedoman terkait, serta dilaksanakan sesuai dengan konteks kondisi, potensi, dan kompleksitas permasalahan yang ada di daerah Gorontalo.

### **Kata Kunci**

Pendampingan teknis, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, kawasan permukiman

### **Pendahuluan**

Berdasarkan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, penyelenggaraan kawasan permukiman dilaksanakan dengan maksud untuk mewujudkan wilayah yang berfungsi sebagai lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan yang terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang. Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (PKP) bertujuan untuk memenuhi hak warga negara atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta menjamin kepastian bermukim. Cakupan penyelenggaraan kawasan permukiman meliputi lingkungan hunian dan tempat kegiatan pendukung perikehidupan dan penghidupan di perkotaan dan perdesaan, serta wajib dilaksanakan sesuai dengan arahan pengembangan kawasan permukiman yang terpadu dan berkelanjutan.

Dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan kawasan permukiman di daerah membutuhkan pembinaan teknis dari Pemerintah Pusat. Pembinaan dilakukan kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan kapasitas pemerintah daerah, terutama pemerintah kabupaten/kota, untuk mampu menjadi nakhoda dalam penyelenggaraan kawasan permukiman di wilayahnya. Peran pembinaan dari

pemerintah pusat memiliki dampak yang sangat besar terhadap keberhasilan pencapaian perwujudan permukiman yang layak huni bahkan berkelanjutan. Meningkatnya kapasitas pemerintah daerah diidentifikasi melalui kemampuan pemerintah daerah dalam merumuskan kebutuhan pengembangan permukiman di wilayahnya, merencanakan serta menyusun program dan kegiatan untuk menjawab kebutuhan.

Kegiatan pendampingan PKP di kabupaten/kota dilakukan dalam lingkup aspek pengelolaan data dan informasi, aspek perencanaan, aspek standar teknis serta aspek kelembagaan. Kegiatan pendampingan penyelenggaraan kawasan permukiman dimaksudkan sebagai bentuk alih pengetahuan untuk meningkatkan kapasitas, pemahaman dan kompetensi pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota serta menjamin hasil pembangunan bidang PKP yang berkualitas dan tepat guna berdasarkan peraturan dan pedoman terkait, serta dilaksanakan sesuai dengan konteks kondisi, potensi, dan kompleksitas permasalahan yang ada di masing-masing wilayah.

### **Metode Pelaksanaan**

Lokasi pendampingan PKP dilaksanakan di Provinsi Gorontalo. Lokasi kajian, penyusunan, dan pembahasan laporan dilaksanakan di Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo. Kegiatan pendampingan dilakukan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dengan melalui 3 (tiga) tahapan pokok penyelenggaraan kegiatan yakni persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Tahapan persiapan dilaksanakan dengan melakukan diskusi dan koordinasi bersama pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam rangka persiapan penyelenggaraan kegiatan dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) dan sosialisasi. Selanjutnya melakukan identifikasi dan pemetaan awal status kebutuhan kegiatan pendampingan masing-masing kabupaten/kota. Kemudian menyusun jadwal kegiatan pendampingan penyelenggaraan kawasan permukiman sesuai dengan hasil diskusi yang telah disepakati serta penyusunan status dan target pendampingan sejalan dengan komitmen pemerintah daerah.

Tahapan pelaksanaan pendampingan penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan dalam lingkup 4 (empat) aspek yaitu : Aspek Pengelolaan Data dan Informasi, Aspek Perencanaan, Aspek Standar Teknis dan Aspek Kelembagaan. Pendekatan dan metodologi pelaksanaan pendampingan PKP dengan mempelajari dan menganalisis lebih lanjut segala informasi dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan aspek-aspek pendampingan, menyusun materi bimbingan teknis, survey serta diskusi dengan *stakeholder* terkait. Tahapan pelaksanaan juga dilakukan melalui pelaksanaan acara antara lain :

- a. Rapat koordinasi yang diikuti beragam pihak yang mewakili pemerintah daerah dan pakar yang terlibat dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kawasan permukiman
- b. FGD dalam rangka *monitoring progress* kegiatan pendampingan penyelenggaraan

kawasan permukiman dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan

- c. Rapat koordinasi dalam rangka evaluasi pencapaian kegiatan pendampingan penyelenggaraan kawasan permukiman dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan

Tahapan pelaporan dilakukan dengan menyusun laporan evaluasi berkala hasil kegiatan pendampingan penyelenggaraan kawasan permukiman. Laporan pendampingan berisi capaian hasil kegiatan pendampingan penyelenggaraan kawasan permukiman di setiap periode (bulan) lengkap dengan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut yang dapat dipertanggung jawabkan serta saran untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan di periode selanjutnya.

### Hasil dan Pembahasan

Dalam aspek pengelolaan data dan informasi, pendampingan penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan dengan menyusun *database* kegiatan penanganan kumuh dan *database* kegiatan strategis nasional yang ada di provinsi Gorontalo. Rekapitulasi penyusunan *database* kegiatan penanganan kumuh dan kegiatan strategis nasional dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2.

Tabel 1. Rekapitulasi Penyusunan Database Penanganan Kumuh

LOKASI DAMPINGAN	STATUS	KETERANGAN
Kota Gorontalo	Sudah memiliki database	Perda kumuh, SK lokasi kumuh, Baseline numerik kumuh, Dokumen RP2KPKP, SK Pokja PKP, SK Forum PKP
Kabupaten Gorontalo	Sudah memiliki database	Perda kumuh, SK lokasi kumuh, Baseline numerik kumuh, Dokumen RP2KPKP, SK Pokja PKP, SK Forum PKP
Kabupaten Bone Bolango	Sudah memiliki database	Perda kumuh, SK lokasi kumuh, Baseline numerik kumuh, Dokumen RP2KPKP, SK Pokja PKP, SK Forum PKP
Kabupaten Gorontalo Utara	Sudah memiliki database	SK lokasi kumuh, Baseline numerik kumuh, SK Pokja PKP, SK Forum PKP
Kabupaten Boalemo	Sudah memiliki database	SK lokasi kumuh, Dokumen RP2KPKP, SK Pokja PKP, SK Forum PKP
Kabupaten Pohuwato	Sudah memiliki database	Perda kumuh, SK lokasi kumuh, Baseline numerik kumuh, Dokumen RKP-KP, SK Pokja PKP, SK Forum PKP

Tabel 2. Rekapitulasi Penyusunan Database Kawasan Strategis Nasional

LOKASI DAMPINGAN	STATUS	KETERANGAN
Kota Gorontalo	Belum memiliki database	
Kabupaten Gorontalo	Sudah memiliki database	<i>Masterplan</i> KPPN Mootilango
Kabupaten Bone Bolango	Belum memiliki database	
Kabupaten Gorontalo Utara	Sudah memiliki database	<i>Masterplan</i> KPPN Kwandang
Kabupaten Boalemo	Sudah memiliki database	<i>Masterplan</i> KPPN Wonosari
Kabupaten Pohuwato	Belum memiliki database	

Database Rencana aksi penanganan kumuh secara umum termuat dalam dokumen RP2KPKP Kabupaten/kota. Capaian kegiatan penanganan kumuh di provinsi Gorontalo oleh pemerintah pusat mencapai mencapai 129,95 hektar. Kegiatan penanganan kumuh melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Rekapitulasi capaian penanganan kumuh selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Rekapitulasi Capaian Penanganan Kumuh Tahun 2021

LOKASI DAMPINGAN	POTENSI CAPAIAN (HEKTAR)	KETERANGAN
Kota Gorontalo	46,94	Penanganan melalui BPM Reguler dan CFW
Kabupaten Gorontalo	83,01	Penangan melauai BPM Reguler
Kabupaten Bone Bolango	-	
Kabupaten Gorontalo Utara	-	
Kabupaten Boalemo	-	
Kabupaten Pohuwato	-	

Rencana aksi penanganan kawasan strategis secara umum termuat dalam dokumen masterplan kawasan strategis Kabupaten/Kota. Dalam proses identifikasi data diperoleh beberapa kawasan strategis yang ada di provinsi Gorontalo antara lain Kawasan Strategis Nasional Gopandang, Kawasan Strategis Nasional Danau Limboto, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Wonosari, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mootilango, Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kwandang. Belum ada capaian kegiatan penanganan kawasan strategis nasional di provinsi Gorontalo pada tahun 2021. Kendala yang ditemui dalam proses penyusunan *database* rencana aksi penanganan kumuh dan penanganan kawasan strategis antara lain beberapa kabupaten belum menyusun dokumen perencanaan rujukan serta belum dilakukan reuiu terhadap dokumen perencanaan yang sudah ada sehingga kemungkinan kurang sesuai dengan kondisi eksisting wilayah.

Dalam aspek perencanaan, kegiatan pendampingan penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan dengan menyusun Rencana Kawasan Permukiman (RKP) dan menyempurnakan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SPKP) kabupaten/kota dalam Sistem Informasi Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SI-SPKP). Rekapitulasi penyusunan RKP dan penyempurnaan SPKP kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4. Rekapitulasi Penyusunan RKP

LOKASI DAMPINGAN	STATUS	KETERANGAN
Kota Gorontalo	Dalam proses penyusunan	Tahap penyusunan profil kawasan permukiman
Kabupaten Gorontalo	Dalam proses penyusunan	Tahap pengumpulan data
Kabupaten Bone Bolango	Dalam proses penyusunan	Tahap pengumpulan data
Kabupaten Gorontalo Utara	Dalam proses penyusunan	Tahap pengumpulan data
Kabupaten Boalemo	Dalam proses pembahasan anggaran	
Kabupaten Pohuwato	Dalam proses penyusunan	Tahap pengumpulan data

Tabel 5. Rekapitulasi Penyempurnaan Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman

LOKASI DAMPINGAN	STATUS	KETERANGAN
Kota Gorontalo	Sudah melakukan penyempurnaan data dalam SI-SPKP	Data strategi pembangunan dan RPIJM
Kabupaten Gorontalo	Sudah melakukan penyempurnaan data dalam SI-SPKP	Data strategi pembangunan dan RPIJM
Kabupaten Bone Bolango	Sudah melakukan penyempurnaan data dalam SI-SPKP	Data strategi pembangunan dan RPIJM
Kabupaten Gorontalo Utara	Sudah melakukan penyempurnaan data dalam SI-SPKP	Data strategi pembangunan dan RPIJM data
Kabupaten Boalemo	Sudah melakukan penyempurnaan data dalam SI-SPKP	Data strategi pembangunan dan RPIJM
Kabupaten Pohuwato	Sudah melakukan penyempurnaan data dalam SI-SPKP	Data strategi pembangunan dan RPIJM

Dalam aspek standar teknis, kegiatan pendampingan penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan dengan melakukan penyiapan *Readiness Criteria* (RC) rencana program kegiatan PKP tahun 2022-2023. Rekapitulasi penyiapan *Readiness Criteria* (RC) kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 6 berikut.

Tabel 6. Rekapitulasi RC Rencana Penanganan Kawasan Kumuh

<i>Readiness Criteria</i> (RC)	STATUS LOKASI DAMPINGAN					
	Kabupaten Gorontalo	Kota Gorontalo	Kabupaten Bone Bolango	Kabupaten Gorontalo Utara	Kabupaten Boalemo	Kabupaten Pohuwato
PERDA RTRW	Siap	Siap	Siap	Siap	Siap	Siap
PERDA BANGUNAN GEDUNG	Siap	Siap	Siap	Siap	Belum Siap	Siap
PERDA KUMUH	Belum Siap	Siap	Siap	Belum Siap	Belum Siap	Siap
SK LOKASI KUMUH	Siap	Siap	Siap	Siap	Siap	Siap
RP2KPKPK	Siap	Siap	Siap	Belum Siap	Siap	Siap
BASELINE NUMERIK KUMUH	Siap	Siap	Siap	Siap	Siap	Belum Siap
PERWAL RP2KPKPK	Belum Siap	Belum Siap	Siap	Belum Siap	Belum Siap	Belum Siap
SURAT MINAT	Siap	Siap	Siap	Belum Siap	Siap	Belum Siap
KESIAPAN LAHAN	Belum Siap	Siap	Siap	Belum Siap	Siap	Belum Siap
KESIAPAN LEMBAGA PENGELOLA DAN PEMELIHARAAN ASET	Belum Siap	Siap	Siap	Belum Siap	Siap	Belum Siap
DDUB	Belum Siap	Siap	Siap	Belum Siap	Belum Siap	Belum Siap
PROFIL KAWASAN RENCANA MASTERPLAN	Belum Siap	Siap	Belum Siap	Belum Siap	Belum Siap	Belum Siap
DED	Siap	Siap	Siap	Siap	Siap	Siap
DED	Belum Siap	Siap	Siap	Belum Siap	Siap	Belum Siap
RAB	Belum Siap	Siap	Siap	Belum Siap	Siap	Belum Siap
TOR	Belum Siap	Belum Siap	Belum Siap	Belum Siap	Belum Siap	Belum Siap
RKS	Belum Siap	Belum Siap	Belum Siap	Belum Siap	Belum Siap	Belum Siap
DOKUMEN LINGKUNGAN	Belum Siap	Siap	Belum Siap	Belum Siap	Belum Siap	Belum Siap

Kendala yang ditemui dalam mendukung persiapan RC yaitu masih kurangnya pemahaman dan dukungan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) terkait pentingnya RC dalam rencana serta capaian pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh diwilayahnya. Dalam mempersiapkan RC, pemerintah kabupaten/kota juga masih terkendala pembiayaan sehingga belum mampu melengkapi seluruh RC yang dibutuhkan.

Dalam aspek kelembagaan, kegiatan pendampingan penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan dengan sosialisasi dan pendampingan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Perda Kumuh), Peraturan Bupati/Walikota tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Perbup RP2KPKPK) dan Reviu Surat Keputusan Bupati/Walikota tentang penetapan Lokasi Permukiman Kumuh (SK Kumuh). Rekapitulasi pendampingan penyusunan Perda Kumuh, Peraturan Bupati/Walikota tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan



Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dan Reviu SK Bupati/Walikota tentang penetapan Lokasi Permukiman Kumuh kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 7, Tabel 8, Tabel 9

Tabel 7. Rekapitulasi Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

LOKASI DAMPINGAN	STATUS	KETERANGAN
Kota Gorontalo	Sudah selesai menyusun perda kumuh	Perda No.19 Tahun 2017
Kabupaten Gorontalo	Dalam proses penyusunan naskah akademik	
Kabupaten Bone Bolango	Sudah selesai menyusun perda kumuh	Perda No. 2 Tahun 2021
Kabupaten Gorontalo Utara	Dalam proses penyusunan naskah akademik	
Kabupaten Boalemo	Dalam proses penyusunan naskah akademik	
Kabupaten Pohuwato	Sudah selesai menyusun perda kumuh	Perda No. 9 Tahun 2016

Tabel 8. Rekapitulasi penyusunan Peraturan Bupati/Walikota tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)

LOKASI DAMPINGAN	STATUS	KETERANGAN
Kota Gorontalo	Dalam proses penyusunan perwali RP2KPKPK	Dalam proses penajaman dokumen RP2KPKPK selesai
Kabupaten Gorontalo	Belum menyusun Perbup RP2KPKPK	
Kabupaten Bone Bolango	Sudah selesai menyusun Perbup RP2KPKPK	Peraturan bupati Bone Bolango No. 13 Tahun 2020
Kabupaten Gorontalo Utara	Belum menyusun Perbup RP2KPKPK	Dalam proses penyusunan dokumen RP2KPKPK
Kabupaten Boalemo	Belum menyusun Perbup RP2KPKPK	
Kabupaten Pohuwato	Belum menyusun Perbup RP2KPKPK	

Tabel 9. Rekapitulasi Reviu SK Bupati/Walikota tentang penetapan Lokasi Permukiman Kumuh

LOKASI PEMBINAAN	STATUS	KETERANGAN
Kota Gorontalo	Sudah selesai reviu	Sudah sesuai Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2018
Kabupaten Gorontalo	Sudah selesai reviu	Sudah sesuai Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2018
Kabupaten Bone Bolango	Sudah selesai reviu	Belum sesuai Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2018
Kabupaten Gorontalo Utara	Sudah selesai reviu	Belum sesuai Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2018
Kabupaten Boalemo	Sudah selesai reviu	Belum sesuai Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2018
Kabupaten Pohuwato	Sudah selesai reviu	Belum sesuai Peraturan Menteri PUPR No.14/PRT/M/2018

Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pendampingan terhadap aspek ini antara lain tidak semua kabupaten/kota melakukan perencanaan penganggaran terkait penyusunan perda kumuh, penyusunan dokumen RP2KPKPK, peraturan Bupati/peraturan walikota RP2KPKPK maupun perencanaan penerbitan SK lokasi kumuh. Tidak semua kabupaten dapat menyusun perda kumuh di tahun 2021, dokumen RP2KPKPK, revisi Dokumen RP2KPKPK, maupun revisi SK kumuh, namun rencananya akan di susun pada tahun 2022.

Dalam aspek kelembagaan, kegiatan pendampingan penyelenggaraan kawasan permukiman dilakukan juga dengan pendampingan terhadap pembentukan kelompok kerja perumahan dan kawasan permukiman (Pokja PKP) dan pembentukan Forum perumahan dan kawasan permukiman (Forum PKP) propinsi dan kota/kabupaten.

Rekapitulasi Pembentukan Pokja PKP dan Forum PKP Propinsi dan Kota/Kabupaten dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Pembentukan Pokja PKP dan Forum PKP Propinsi dan Kota/Kabupaten sesuai Peraturan Menteri PUPR No.12 Tahun 2020

LOKASI DAMPINGAN	STATUS	KETERANGAN
Provinsi Gorontalo	Sudah selesai membentuk Pokja PKP dan Forum PKP Provinsi Gorontalo	SK Gubernur Nomor 291/28/XI/2020, SK Kepala Bappeda Nomor 44 Tahun 2021
Kota Gorontalo	Sudah selesai membentuk Pokja PKP dan Forum PKP Kota Gorontalo	SK Walikota Nomor 330/2/XI/2020, SK Kepala Bappeda Nomor 43 Tahun 2021
Kabupaten Gorontalo	Sudah selesai membentuk Pokja PKP Kabupaten Gorontalo	SK Bupati Nomor 645/28/XII/2020 SK Kepala Bappeda Nomor 441/SK/XII/2020
Kabupaten Bone Bolango	Sudah selesai membentuk Pokja PKP Kabupaten Bone Bolango	SK Bupati Nomor 232/KEP/BUP.PP/139/2020, SK Sekda Nomor 007/SETDA-BB/2410/XII/2020
Kabupaten Gorontalo Utara	Sudah selesai membentuk Pokja PKP Kabupaten Gorontalo Utara	SK Bupati Nomor SK.418.XI.2020, SK Sekda Nomor 600/SK/SETDA/11/III/2021
Kabupaten Boalemo	Sudah selesai membentuk Pokja PKP Kabupaten Boalemo	SK Bupati Nomor 022/528/XII/Tahun 2020, SK Kepala Bappeda Nomor 16 Tahun 2021
Kabupaten Pohuwato	Sudah selesai membentuk Pokja PKP Kabupaten Pohuwato	SK Bupati Nomor 390/25/XII/2020, SK Sekda Nomor 050/sekbaperlitbang/phwt/109

Pokja PKP serta Forum PKP Kabupaten/Kota sudah terbentuk sejak tahun 2020, namun belum optimal kapasitasnya. Sebagian besar Pokja dan Forum yang terbentuk belum aktif dalam kegiatan PKP. Rencana kerja Pokja PKP dan Forum PKP masih kurang maksimal. Kendala yang juga ditemui selama proses pendampingan antara lain cepatnya pergantian pejabat pemerintahan di daerah serta kurangnya *sharing knowledge* antar personil Pokja dan Forum PKP.

## Simpulan

Pendampingan PKP telah dilakukan terhadap lingkup aspek pengelolaan data dan informasi PKP di Provinsi Gorontalo. Kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo sudah memiliki database kumuh. Rencana aksi penanganan kumuh kabupaten/kota sudah termuat di dalam dokumen RP2KPKP, namun masih perlu diperiksa kesesuaiannya dengan kondisi eksisting yang ada. Tidak semua kabupaten/kota termasuk dalam kawasan strategis nasional. Rencana aksi penanganan kawasan strategis di kabupaten/kota sudah termuat dalam *masterplan* kawasan, namun perlu diperiksa kembali kesesuaiannya dengan kondisi eksisting wilayah.

Pendampingan PKP telah dilakukan terhadap lingkup aspek perencanaan PKP di Provinsi Gorontalo. Rencana kawasan permukiman kabupaten/kota masih dalam proses penyusunan. Rencana kawasan permukiman kabupaten/kota sebagian termuat di dalam dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) kabupaten/ kota. Rencana kawasan permukiman kabupaten/kota perlu untuk segera dirampungkan, sehingga rencana pembangunan dan pengembangan permukiman kedepan tidak tumpang tindih dan lebih terarah. Data-data strategi penyelenggaraan kawasan permukiman di kabupaten/kota sudah di input kedalam Sistem Informasi Strategi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman (SI-SPKP) Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, namun namun masih harus terus melakukan update data secara berkala, sehingga perencanaan pembangunan infrastruktur keciptakarya dalam jangka menengah lebih terarah dan sesuai dengan kondisi eksisting wilayah dan tingkat prioritas penanganan.

Pendampingan PKP telah dilakukan terhadap lingkup aspek standar teknis PKP di Provinsi Gorontalo. Pemerintah daerah kabupaten/ kota sudah mempersiapkan *readiness criteria* (RC) yang dibutuhkan untuk usulan kegiatan penanganan kawasan kumuh, namun masih banyak RC yang perlu dilengkapi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Dokumen perencanaan yang telah disusun oleh pemerintah kabupaten/kota sudah di reviu mengikuti standar teknis yang berlaku, namun masih perlu untuk terus dikaji perbaikannya untuk memutakhirkan kembali kesesuaian lokasi eksisting, analisis biaya dan metoda terkini.

Pendampingan PKP telah dilakukan terhadap lingkup aspek kelembagaan PKP di Provinsi Gorontalo. Pemerintah daerah kabupaten/kota telah menyusun perda kumuh dan SK Lokasi kumuh, namun masih perlu menyempurnakan muatannya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018. Pemerintah daerah Kabupaten/Kota juga telah menyusun dokumen RP2KPKP, namun masih perlu untuk melakukan penajaman muatan sesuai Surat edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 30 Tahun 2020. Dokumen RP2KPKP yang akan dipertajam menjadi dokumen RP2KPKP perlu untuk dilegalisasi dalam bentuk Peraturan Bupati/Walikota. Pokja PKP dan Forum PKP provinsi gorontalo dan kabupaten/kota sudah terbentuk, namun belum optimal kapasitasnya. Koordinasi antar *stakeholder* harus berjalan dengan baik sehingga mampu memetakan kebutuhan pembangunan dengan lebih spesifik. Pemerintah daerah harus dapat memahami urgensi dari setiap kegiatan yang diusulkan, serta berkomitmen penuh dalam mempersiapkan segala persyaratan penunjang rencana kegiatan penyelenggaraan kawasan permukiman.

### **Daftar Pustaka**

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang *Perumahan dan Kawasan Permukiman*  
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019 tentang *Satu Data Indonesia*  
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang *Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh*  
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang *Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kawasan Permukiman*  
Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 39 Tahun 2020 tentang *Pedoman Penyusunan, Penetapan, dan Peninjauan Kembali Rencana Kawasan Permukiman*